



Peran Duta Baca dalam Memperkuat Kesadaran Kesetaraan Gender Melalui Tata Kelola Literasi di Kabupaten Bandung

Erisya Siti Khodijah

Universitas Wanita Internasional, Indonesia

Email : erisyasitikhodjah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Duta Baca Kabupaten Bandung dalam memperkuat kesadaran dan praktik kesetaraan gender melalui aktivitas tata kelola literasi di tingkat lokal. Kajian ini penting dilakukan karena Kabupaten Bandung telah memiliki Perda No.24 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan daerah di Kabupaten Bandung, sehingga sangat penting untuk melihat nilai dan implementasi kebijakan kesetaraan gender dapat diperkuat melalui keterlibatan aktor lokal non-negara. Dalam konteks tersebut, Duta Baca memiliki potensi besar dalam menyebarkan kesadaran kesetaraan gender dalam setiap jengkal kehidupan melalui aktivitas literasi, khususnya di lingkungan perpustakaan daerah dan masyarakat pemustaka. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam terhadap Duta Baca Kabupaten Bandung Periode 2025 dan seorang pegiat literasi Duta Baca, didukung dengan studi dokumen Undang-undang, artikel, dan data yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan Duta Baca yang mengharuskan satu pasang duta laki-laki dan perempuan di setiap angkatan, peran Duta Baca sebagai teladan (role model) bagi kedua gender, serta kolaborasinya dengan program dibawah naungan Dinas Perpustakaan dan Arsip turut memperkuat kesadaran kesetaraan gender di kalangan stakeholder, meliputi pemerintah daerah, komunitas literasi, dan masyarakat. Dalam implementasinya ditemukan kesenjangan pada tahap seleksi finalis 2026 yang didominasi peserta perempuan, menunjukkan bahwa kesetaraan gender selama ini lebih ditegaskan pada tahap keluaran (output) ketimbang keseluruhan proses seleksi, dan seluruh capaian masih bergantung pada komitmen tidak tertulis, bukan regulasi formal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi kajian ilmu sosial dan hubungan internasional mengenai peran aktor lokal non-negara (non-state local actor) dalam pengarusutamaan isu gender di level daerah, sekaligus menjadi bahan evaluatif bagi pentingnya keberlanjutan program Duta Baca ke depan.

Kata Kunci: Duta Baca; Kesetaraan Gender; Tata Kelola Literasi; Aktor Lokal Non-Negara; Kabupaten Bandung

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender adalah salah satu isu pembangunan global mendasar yang secara konsisten menjadi pembahasan dalam agenda pembangunan internasional melalui SDGs atau *Sustainable Development Goals* pada 2030 pada poin 5, yang berisi mengenai pencapaian gender dan pemberdayaan perempuan. Pemahaman ini, mencakup penghapusan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, memastikan akses ke pendidikan dan pekerjaan yang layak, mendorong partisipasi penuh dalam pengambilan keputusan di dunia ekonomi, sosial dan politik (unair.ac.id, 2025). Komitmen global ini menegaskan bahwa pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan tidak mungkin terwujud, apabila kebanyakan kaum perempuan masih mengalami marginalisasi serta kekerasan struktural (Sudirman & Susilawaty, 2022).

Dengan demikian, pengarusutamaan gender wajib diintegrasikan dalam seluruh lini kebijakan pembangunan lintas sektor.

Sebagai instrumen global dalam siklus pembangunan, Pengarusutamaan Gender atau bisa disingkat dengan PUG (*gender mainstreaming*) diterapkan sebagai strategi inti untuk mengintegrasikan perspektif gender. Pendekatan ini dirancang secara sistematis guna menjamin representasi aspirasi, kebutuhan, dan pengalaman laki-laki maupun perempuan pada seluruh tahapan kebijakan, mulai dari fase formulasi dan implementasi, hingga pengawasan serta evaluasi program (uny.ac.id, 2022). Secara institusional, Pemerintah Indonesia telah melegitimasi konsep PUG melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 yang memuat mengenai amanat kepada seluruh lembaga negara supaya memasukkan dimensi gender dalam mengentaskan ketimpangan gender di Indonesia (BPK, 2000). Namun pada implementasinya, aktualisasi nilai-nilai kesetaraan gender kerap berbenturan dengan hambatan sosiokultural terutama masih mengakarnya konstruksi budaya patriarki dalam lingkungan masyarakat.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menunjukkan komitmen formal dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan melalui kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (bpk.go.id, 2016). Hal tersebut kemudian diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (jabarprov.go.id, 2021). Kedua regulasi tersebut menjadi landasan normatif yang menegaskan bahwa isu kesetaraan gender telah memperoleh legitimasi dalam kerangka kebijakan pembangunan daerah (*policy on paper*).

Secara empiris, perhatian pemerintah daerah terhadap isu kesetaraan gender dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bandung yang mencapai 95,26 pada tahun 2025 (statistik.jabarprov.go.id, 2026). Meskipun demikian, capaian tersebut belum dapat sepenuhnya merepresentasikan keberhasilan pembangunan gender secara menyeluruh di masyarakat. Hal ini tercermin dari masih ditemukannya kesenjangan pada sejumlah indikator dalam Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2025 di Kabupaten Bandung sejumlah 0,428, terutama terkait keterlibatan perempuan dalam ruang publik dan aspek ekonomi yang ditunjukkan melalui adanya perbedaan pendapatan antara pekerja laki-laki dan perempuan (BPS, 2026). Kesenjangan antara keberadaan regulasi dan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa upaya mewujudkan kesetaraan gender tidak cukup apabila hanya bertumpu pada peran dan intervensi pemerintah melalui pendekatan yang bersifat *state-centric governance*, atau negara mengambil alih atas semua kendali urusan pemerintahan.

Dalam perkembangan konsep *governance* kontemporer, proses penyelesaian persoalan publik tidak lagi hanya dipandang sebagai tanggung jawab negara, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai aktor non-negara bereputasi baik dan terpercaya yang memiliki kedekatan emosional, sosial dan kultural dengan masyarakat khususnya pada tingkat akar rumput (Khanza, 2021). Keterlibatan aktor non-negara menjadi penting karena mereka memiliki ruang yang lebih aktif dan fleksibel dalam membangun pendekatan yang komprehensif, edukatif, serta komunikasi yang mendorong kesadaran dan pemberdayaan masyarakat, yang dalam beberapa kondisi tidak dapat sepenuhnya dijangkau melalui instrumen formal pemerintah (pinterhukum.or.id, 2023). Kemampuan *social capital* yang dimiliki aktor lokal non-negara dapat berperan sebagai penghubung antara kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah dengan realitas kehidupan masyarakat. Peran tersebut memungkinkan norma dan nilai yang terkandung dalam kebijakan kesetaraan gender untuk tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi dapat diterjemahkan dengan mudah dan diterapkan dalam praktik kehidupan sosial sehari-hari.

Salah satu ruang sosial yang memiliki potensi besar dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender dapat ditemukan dalam ekosistem tata kelola literasi dalam lingkungan masyarakat. Seiring dengan perkembangan pemikiran mengenai literasi, konsep tersebut tidak lagi terbatas pada kemampuan membaca dan menulis secara teknis, tetapi telah bertransformasi menjadi literasi kritis yang mencakup kemampuan masyarakat dalam memahami, mengolah, serta menggunakan informasi secara reflektif untuk mendorong perubahan sosial masyarakat menuju lebih cerdas (Sandra, 2025). Dalam perspektif tersebut, perpustakaan, komunitas baca, maupun berbagai kegiatan literasi dapat dipahami sebagai ruang publik yang inklusif atau *third place*, yaitu ruang di luar lingkungan rumah dan institusi formal yang memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi, bertukar gagasan, serta membangun pemahaman bersama mengenai berbagai dinamika persoalan sosial dan pembangunan, termasuk isu keadilan gender (Pamungkas, Annur, & Munadi, 2026). Oleh karena itu, keberadaan tata kelola literasi tidak hanya berperan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi, tetapi juga dapat menjadi sarana non-formal yang strategis untuk membangun pengetahuan, kesadaran kritis, dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kesetaraan gender.

Dalam ekosistem literasi wilayah Kabupaten Bandung, kehadiran duta baca memiliki peran yang cukup strategis sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam pengembangan literasi di tingkat lokal. Duta Baca hadir sebagai figur publik daerah yang berperan dalam mendorong minat baca sekaligus mendukung terbentuknya budaya literasi di tengah masyarakat. Dalam perspektif sosiologis, posisi tersebut memungkinkan Duta Baca berperan sebagai *boundary spanner*, yaitu pihak yang menjembatani hubungan antara institusi pemerintah, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan masyarakat dan komunitas di tingkat lokal (Sartika, 2022). Walaupun duta baca tidak memiliki kewenangan formal dalam proses perumusan maupun pengambilan kebijakan, pengaruh yang dimilikinya dapat dibangun melalui aktivitas komunikasi, edukasi, serta pemberian contoh kepada masyarakat (*role modeling*). Kondisi tersebut membuka ruang bagi Duta Baca untuk tidak hanya mempromosikan budaya membaca, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai sosial tertentu, termasuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, ke dalam berbagai kegiatan literasi yang dilaksanakan di tingkat lokal.

Mayoritas penelitian terdahulu mengenai Duta Baca dan gerakan literasi masih terkonsentrasi pada efektivitas program, strategi komunikasi, serta peningkatan minat baca, yang menegaskan peran mereka sebagai komunikator dan *role model* (Nadiya, Nursanti, & Lubis, 2023). Namun, literatur tersebut memiliki keterbatasan konseptual karena hanya membingkai Duta Baca dalam disiplin ilmu perpustakaan konvensional. Kajian ini mengidentifikasi adanya urgensi untuk memperluas cakupan analisis ke ranah sosial-politik, terutama dalam mengeksplorasi kontribusi strategis Duta Baca terhadap penguatan pengarusutamaan gender yang selama ini luput dari pembahasan akademik.

Sebagai landasan analitis, penelitian ini menggabungkan teori peran yang dikemukakan Biddle (1996), konsep Aktor non-negara dalam Tata Kelola karya Pierre dan Peters (2000), serta perspektif Transnasionalisme dari Keck dan Sikkink (1998). Melalui teori peran, penelitian ini menyoroti bagaimana Duta Baca memahami tugas yang diharapkan dari mereka lalu mewujudkannya melalui tindakan nyata. Tindakan tersebut mencakup peran mereka sebagai penggerak literasi sekaligus pembawa pesan kesetaraan gender di ruang publik (Biddle, 1986). Selanjutnya konsep aktor non-negara digunakan untuk melihat strategi Duta Baca dalam memanfaatkan pengaruh sosial mereka. Pengaruh ini memungkinkan mereka untuk mengubah sudut pandang masyarakat dan para pemangku kepentingan walaupun Duta Baca tidak memiliki kekuasaan resmi secara birokrasi tetapi mereka bisa menjadi jembatan antara keduanya (Triansyah, 2023). Pada titik inilah teori transnasionalisme dari Keck dan Sikkink (1998) melengkapi pembahasan dengan memposisikan duta baca tidak hanya sebagai tokoh

lokal, melainkan sebagai roda penggerak di tingkat akar rumput yang bertugas menyerap sekaligus menyebarkan gagasan global seperti inklusivitas dan kesetaraan gender ke dalam praktik kehidupan masyarakat luas (Soetjipto & Yuliestiana, 2020).

Meskipun kajian mengenai topik pengarusutamaan gender di tingkat lokal telah berkembang, sejumlah penelitian masih menempatkan pemerintah dan kelembagaan formal sebagai fokus utama, terutama dalam melihat proses pelebagaan PUG, implementasi kebijakan, serta integrasi perspektif gender ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan (Nurdin, 2024). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan PUG di tingkat daerah masih banyak diarahkan pada kapasitas institusi pemerintah dalam menjalankan regulasi serta mekanisme kebijakan yang responsif gender. Sementara itu, ruang untuk melihat keterlibatan aktor lokal non-negara dalam mendukung pengarusutamaan gender melalui sektor lain di luar mekanisme pemerintahan formal masih relatif terbatas.

Berdasarkan *Research gap* yang telah diidentifikasi, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis peran Duta Baca Kabupaten Bandung dalam membangun kesadaran mengenai kesetaraan gender melalui ekosistem tata kelola literasi di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk peran, strategi komunikasi, serta pola interaksi yang dilakukan oleh Duta Baca dalam mendukung penyebaran nilai-nilai kesetaraan gender di lingkungan masyarakat lokal. Secara akademis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sosiologi pembangunan dan ilmu pemerintahan, khususnya dalam memahami keterlibatan aktor non-negara dalam proses gender *governance* melalui pendekatan Teori Peran. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengevaluasi dan mengembangkan sinergi antara program pembudayaan literasi dengan agenda pengarusutamaan gender di tingkat daerah.

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dilakukan oleh Shalsa Nurfadillah, Yunus Winoto, Saleha Rodiah (2023) dalam jurnal NAUTICAL: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia dengan judul: Peran Duta Baca dalam Meningkatkan Literasi Minat Baca pada Generasi Z di Jawa Barat. Penelitian ini mengkaji mengenai peran Duta Baca Jawa Barat dalam meningkatkan literasi Generasi Z melalui pendekatan komunikasi pemasaran *information exchange* dan *modelling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi programnya, Duta Baca aktif menjalankan safari literasi dan konten media sosial dengan dukungan kredibilitas komunikator, perencanaan terstruktur, serta personal branding yang kuat (Nurfadillah, Winoto, & Winoto, 2026). Berdasarkan penelitian ini, penulis menjadikan hal tersebut sebagai landasan untuk menghadirkan kebaruan atau novelty yakni dengan menggeser peran duta baca dari sekedar pendorong minat baca menjadi agen advokasi kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Bandung.
2. Penelitian dilakukan oleh Riska Nabila, Yamardi, dan Dahly Sukmapryandhika (2025) dalam jurnal Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang berjudul Pengaruh Pelaksanaan Program Literasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Terhadap Efektivitas Pembangunan Budaya Literasi di Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung. Penelitian ini mengkaji implementasi program literasi Dispusip Kabupaten Bandung terhadap efektivitas pembangunan budaya literasi di Kecamatan Rancabali. Hasil penelitian yang menggunakan metode kuantitatif menunjukkan adanya dampak positif sebesar 25,2% antara pelaksanaan program literasi dengan program dengan efektivitas budaya literasi di kawasan tersebut, meskipun tantangan masih terlihat jelas dari pelaksanaan evaluasi yang cenderung satu arah, ketidakkonsistenan jadwal, juga rendahnya dukungan lingkungan masyarakat (Nabila, Yamardi, & Sukmapryandhika, 2025). Penulis mengutip penelitian ini

guna memperkuat *novelty*, yang dimana penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas program secara umum. Sedangkan penelitian saya memperluas fokus tersebut dengan menambahkan variabel Duta Baca sebagai program dibawah naungan Dispusip Kabupaten Bandung, juga dimensi kesetaraan gender dalam tata kelola literasi.

3. Penelitian dilakukan oleh Galih Ramadhan (2026) dalam skripsi yang berjudul Peran Duta Baca Dalam Mendukung Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru: Analisis Metode Cippo. Penelitian ini mengkaji peran duta baca dalam mendukung program perpustakaan daerah melalui pendekatan lima aspek evaluasi kerangka CIPPO (*Context, Input, Process, Product, Outcome*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun program ini menunjukkan dampak positif, optimalisasi keberlanjutan ini masih terkendala oleh keterbatasan alokasi anggaran, pelatihan dan kolaborasi lintas pihak (Ramadhan, 2026). Temuan tersebut menjadi acuan untuk membangun kebaruan di penelitian saya, yang menggeser fokus evaluasi program Dispusip Kota Pekanbaru menjadi penguatan kebijakan kesetaraan gender berbasis tata kelola literasi di Dispusip Kabupaten Bandung.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, penelitian peningkatan minat baca, peran Dispusip dalam membangun budaya literasi, dan Duta Baca yang berperan strategis di Kota Pekanbaru. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji mengenai peran duta baca yang membahas mengenai dukungannya terhadap kesadaran pentingnya kesetaraan gender melalui tata kelola literasi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengkaji lebih mendalam mengenai implementasi duta baca di Kabupaten Bandung yang menjadi media penyampaian informasi berbagai program literasi Dispusip untuk meningkatkan pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Bandung.

KAJIAN LITERATUR

1. Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*)

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, PUG dipahami sebagai strategi untuk mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan baik perempuan maupun laki-laki ke dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan dan program (BPK, 2000). Dengan demikian, gender tidak hanya ditempatkan sebagai isu yang berkaitan dengan perempuan, tetapi menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam setiap proses pembangunan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender membutuhkan perubahan dalam proses kebijakan agar kepentingan perempuan dan laki-laki dapat dipertimbangkan secara lebih proporsional.

Dalam konteks kebijakan publik, PUG memiliki karakter yang bersifat lintas sektor karena penerapannya tidak terbatas pada satu bidang pembangunan tertentu. Isu gender dapat muncul dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial, maupun pelayanan publik (Azzahra, 2025). Oleh karena itu, pengarusutamaan gender menuntut adanya perspektif gender dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan tidak secara langsung memperkuat ketimpangan yang telah ada. PUG pada dasarnya berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan mampu mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, serta pengalaman yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.

Pelaksanaan PUG di tingkat daerah juga tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi dibutuhkan dukungan dari berbagai unsur dalam tata kelola pemerintahan. Keberhasilan penerapan PUG dapat dilihat melalui beberapa prasyarat yang saling

berkaitan, yaitu adanya komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, ketersediaan data dan sistem informasi, metode analisis gender, serta partisipasi masyarakat. Ketujuh prasyarat tersebut menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender (Kertati, 2022). Dengan demikian, keberadaan kebijakan mengenai gender saja belum cukup apabila tidak disertai dengan kelembagaan yang memadai, sumber daya manusia yang memiliki pemahaman gender, data yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Selain aspek kelembagaan, partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung keberlanjutan PUG. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat dari kebijakan pembangunan, tetapi juga dapat berperan dalam membentuk pemahaman dan kesadaran mengenai kesetaraan gender. Dalam hal ini, proses pengarusutamaan gender membutuhkan komunikasi dan penyebaran nilai-nilai kesetaraan agar perspektif gender tidak hanya dipahami oleh pemerintah atau lembaga formal, tetapi juga dapat diterima dalam kehidupan sosial masyarakat yang lebih luas (firdaus, 2022). Berbagai aktor di luar pemerintahan, termasuk komunitas, organisasi masyarakat, maupun individu yang memiliki peran di ruang publik, dapat turut berkontribusi dalam memperkenalkan dan menguatkan pemahaman mengenai kesetaraan gender di tingkat lokal.

Dengan demikian, PUG dapat dipahami bukan hanya sebagai strategi administratif dalam penyusunan kebijakan, tetapi juga sebagai proses yang melibatkan berbagai aktor dan lingkungan sosial dalam membangun kesadaran mengenai kesetaraan gender. Perspektif ini menjadi relevan dalam melihat peran Duta Baca Kabupaten Bandung sebagai salah satu aktor yang berada dalam ekosistem literasi daerah. Melalui kegiatan literasi, komunikasi publik, dan interaksi dengan masyarakat, Duta Baca memiliki ruang untuk menyampaikan nilai-nilai sosial, termasuk nilai kesetaraan gender. Oleh karena itu, konsep PUG dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana nilai dan prinsip kesetaraan gender dapat diperkenalkan serta dikomunikasikan melalui aktor non-pemerintah dalam konteks tata kelola literasi di tingkat lokal.

2. Tata Kelola Literasi (*Literacy Governance*)

Tata kelola literasi dapat diartikan sebagai suatu mekanisme penyelenggaraan program literasi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan membaca masyarakat, tetapi juga mencakup proses kolaborasi antar aktor dalam menciptakan budaya literasi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, tata kelola literasi melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah melalui dinas perpustakaan, komunitas literasi, lembaga pendidikan, hingga individu penggerak literasi yang memiliki peran strategis dalam menjangkau masyarakat secara langsung (Direktorat, 2025). Dari pernyataan tersebut, penulis melihat bahwa kontribusi seluruh stakeholder menentukan penyebaran informasi mengenai pentingnya literasi.

Salah satu aktor penting dalam tata kelola literasi adalah Duta Baca yang berperan sebagai penggerak sekaligus representasi kampanye budaya membaca di tingkat masyarakat. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menempatkan Duta Baca sebagai figur yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran literasi publik melalui berbagai aktivitas edukatif dan advokasi membaca (Sartika, 2022). Kehadiran Duta Baca tidak hanya berfungsi sebagai simbol gerakan literasi, tetapi juga sebagai aktor yang mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah ke dalam bentuk kegiatan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif kebijakan publik, keberadaan Duta Baca menunjukkan adanya pola kolaborasi antara pemerintah dan aktor non-negara dalam mendukung keberhasilan implementasi program literasi. Duta Baca memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara regulasi literasi yang dirancang oleh pemerintah dengan praktik pelaksanaannya di tingkat akar rumput. Melalui pendekatan tersebut, program literasi dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, termasuk kelompok perempuan dan anak yang menjadi bagian penting dalam upaya penguatan kesetaraan gender melalui akses terhadap pengetahuan dan pendidikan.

Di Kabupaten Bandung, peran Duta Baca diwujudkan melalui keterlibatan dalam berbagai program yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, seperti Perpustakaan Keliling, Motor Baca (Torca), serta Safari Literasi Sekolah (SARASA) (Ekos, 2025). Program-program tersebut menjadi ruang implementasi tata kelola literasi yang memungkinkan Duta Baca berinteraksi langsung dengan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Duta Baca tidak hanya mendorong peningkatan minat baca, tetapi juga berpotensi membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, pemberdayaan, dan kesetaraan kesempatan bagi seluruh kelompok sosial.

Dengan demikian, tata kelola literasi yang melibatkan Duta Baca dapat dipahami sebagai salah satu instrumen pendukung dalam memperkuat kebijakan kesetaraan gender. Melalui akses literasi yang lebih merata, perempuan dan kelompok rentan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh informasi, meningkatkan kapasitas diri, serta berpartisipasi dalam pembangunan sosial (Sundari, 2026). Oleh karena itu, kajian mengenai peran Duta Baca menjadi penting untuk melihat sejauh mana aktor literasi mampu berkontribusi dalam menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung terciptanya pembangunan daerah yang inklusif di Kabupaten Bandung.

3. Peran Aktor Non-Negara dalam Isu Sosial Lokal

Dalam perspektif Ilmu Hubungan Internasional, pembahasan mengenai aktor tidak lagi hanya berfokus pada negara sebagai aktor utama dalam hubungan global, tetapi juga mencakup keberadaan aktor non-negara (*non-state actors*) yang memiliki peran dalam merespons berbagai isu kontemporer (Nasution, 2019). Perubahan dinamika global menunjukkan bahwa individu, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil turut memiliki kapasitas dalam mendorong pencapaian agenda pembangunan global, termasuk isu kesetaraan gender dan peningkatan kualitas pendidikan melalui literasi yang menjadi bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs). Perluasan konsep aktor non-negara tersebut memungkinkan kajian Hubungan Internasional melihat peran individu di tingkat lokal sebagai bagian dari proses implementasi norma global.

Dalam konteks ini, Duta Baca dapat dipahami sebagai aktor lokal yang memiliki kontribusi dalam menerjemahkan nilai-nilai global seperti inklusivitas, kesetaraan akses pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat ke dalam bentuk kegiatan literasi yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Keberadaan Duta Baca menunjukkan adanya hubungan antara norma internasional, kebijakan nasional, dan praktik lokal (*local implementation*). Melalui berbagai aktivitas literasi, Duta Baca berperan sebagai aktor perantara (*intermediary actor*) yang menghubungkan agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG ke-4 mengenai pendidikan berkualitas dan SDG ke-5 mengenai kesetaraan gender, dengan kebutuhan masyarakat di tingkat daerah (dinarpustaka.lamongankab.go.id, 2025). Peran tersebut menjadi penting karena pencapaian tujuan global tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktor lokal yang mampu menjangkau masyarakat secara langsung.

Dalam kerangka *local governance*, keterlibatan Duta Baca memperlihatkan bahwa penyelenggaraan urusan publik tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan melibatkan berbagai aktor non-pemerintah dalam proses pembangunan daerah. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, dinas perpustakaan, komunitas literasi, serta lembaga pendidikan, Duta Baca memiliki ruang untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan literasi sekaligus membuka akses pengetahuan yang lebih inklusif bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan.

Dengan demikian, kajian mengenai peran Duta Baca dalam tata kelola literasi dapat ditempatkan dalam perspektif Hubungan Internasional yang melihat keterkaitan antara isu global dan praktik lokal. Duta Baca tidak hanya berperan sebagai penggerak budaya membaca, tetapi juga sebagai aktor lokal yang mendukung proses lokalisasi nilai-nilai pembangunan berkelanjutan melalui literasi. Hal tersebut menjadikan Duta Baca sebagai salah satu elemen penting dalam memperkuat kebijakan kesetaraan gender melalui peningkatan kapasitas, akses informasi, dan partisipasi masyarakat di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Bandung.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*) untuk memahami secara mendalam peran Duta Baca Kabupaten Bandung dalam menguatkan kesadaran kesetaraan gender di tingkat lokal. Objek penelitian berfokus pada bentuk peran, strategi komunikasi, kegiatan literasi, serta pola interaksi Duta Baca dengan masyarakat dan aktor terkait. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Duta Baca, dan pegiat literasi yang menitikberatkan pada penggalian makna, pengalaman, dan narasi personal narasumber, bukan pengukuran hubungan sebab-akibat secara statistik. Adapun data sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan literatur terkait pengarusutamaan gender, literasi, teori peran, dan *gender governance*.

Lokasi Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Subjek utama penelitian adalah Mochamad Yayang Ikhsan Ripandi, Duta Baca Kabupaten Bandung periode 2025, yang diwawancarai secara daring (*Google Meet*) pada 19 Agustus 2026. Sebagai informan pendukung untuk keperluan triangulasi data, penelitian juga melibatkan Rike Damayanti, seorang pegiat literasi yang berkecimpung dalam ekosistem Duta Baca, yang diwawancarai melalui pesan tertulis (*WhatsApp*) pada 30 Agustus 2026 (Khodijah, 2026).

Teknik Pengumpulan Data

- Wawancara mendalam (*in-depth interview*) semi-terstruktur dengan kedua narasumber di atas, menggunakan pedoman wawancara yang mencakup proses seleksi, tantangan, kegiatan rutin, program unggulan, refleksi purna tugas, serta keterkaitannya dengan isu kesetaraan gender.
- Studi dokumen atau arsip peraturan diantara seperti Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan, buku informasi resmi Duta Baca Kabupaten Bandung, serta publikasi resmi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia terkait program Duta Baca.

- Observasi tidak langsung terhadap dokumentasi studi literatur maupun kegiatan literasi yang melibatkan unsur kesetaraan gender, sebagaimana terdapat pada publikasi resmi Duta Baca Kabupaten Bandung.

Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif melalui tahapan pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk melihat bagaimana peran dan strategi komunikasi Duta Baca berkontribusi terhadap penguatan kesadaran kesetaraan gender. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar temuan penelitian memiliki tingkat kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Proses dan Perjalanan Menjadi Duta Baca

Program Duta Baca merupakan program yang berada di bawah naungan Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) masing-masing kabupaten/kota, dan di Kabupaten Bandung program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2021. Program ini menjadi salah satu wadah bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam pengembangan literasi di daerahnya masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mochamad Yayang Ikhsan Ripandi selaku Duta Baca Kabupaten Bandung Tahun 2025, diperoleh gambaran bahwa perjalanan menjadi Duta Baca tidak berlangsung secara instan. Sebagaimana dituturkan narasumber:

“Seperti yang sudah kita ketahui, duta baca berada dalam naungan Dispusip atau Dinas Perpustakaan dan Arsip masing-masing Kabupaten atau Kota, salah satunya Kabupaten Bandung. Pelaksanaan program duta baca ini telah ada sejak tahun 2021.”

Minat awal narasumber sebenarnya tertuju pada program Duta Baca Kota Bandung yang lebih dekat dengan domisili dan kampusnya, yakni Universitas Kebangsaan RI, jurusan Ilmu Komunikasi. Namun karena kuota pendaftaran telah penuh, narasumber mengalihkan minatnya ke program Duta Baca Kabupaten Bandung. Kendala serupa kembali terjadi pada tahun 2024 karena keterlambatan mengakses informasi pendaftaran, sehingga narasumber harus menunggu sekitar satu tahun hingga akhirnya dapat mendaftar pada tahun 2025 melalui mekanisme rekomendasi kecamatan.

Proses seleksi yang dilalui narasumber terdiri atas lima tahapan, yaitu: (1) pengumpulan berkas administrasi berupa CV, portofolio, dan video profil perkenalan diri; (2) wawancara dan tes tulis seputar kedutaan, kedaerahan, keperpustakaan, dan literasi; (3) unjuk bakat sebagai ajang menampilkan potensi diri; (4) penugasan lapangan yang mengharuskan peserta bekerja sama dengan stakeholder literasi seperti Bunda Literasi; serta (5) babak *grand final* yang menuntut peserta memaparkan program inovasi literasi. Penilaian akhir oleh dewan juri didasarkan pada tiga indikator utama, yaitu pengetahuan, sikap, dan tahap aktualisasi.

Motivasi narasumber mengikuti seleksi ini didasari oleh keinginan untuk tetap produktif setelah purna menjabat sebagai Ketua BEM, memperoleh manfaat pengembangan diri, serta berkontribusi bagi masyarakat tanpa harus mengeluarkan anggaran pribadi yang besar karena program ini difasilitasi penuh oleh dinas terkait. Dalam menjalankan tugasnya, narasumber menghadapi sejumlah tantangan, meliputi keterbatasan perangkat teknologi dalam mendukung pembuatan konten *personal branding* di media sosialnya seperti Instagram, jarak tempuh yang jauh mengingat terdapat 31 kecamatan di Kabupaten Bandung yang harus

dijangkau oleh 20 orang peserta, serta kesulitan membagi waktu antara kuliah, pekerjaan, dan tugas kedutaan. Meskipun demikian, pencapaian tertinggi yang diraih narasumber adalah menjadi Juara 1 Duta Baca se-Jawa Barat berpasangan dengan Duta Baca Perempuan Kabupaten Bandung, serta memperoleh sertifikat apresiasi langsung dari Bupati Kabupaten Bandung (Khodijah, 2026). Dari paparan tersebut, penulis menganalisis bahwa proses menjadi Duta Baca melibatkan tahapan seleksi yang cukup ketat dan menuntut komitmen tinggi, sekaligus menjadi ruang aktualisasi diri bagi generasi muda dalam berkontribusi pada isu literasi daerah.

Peran Duta Baca terhadap Penguatan Literasi dan Kesetaraan Gender

Duta Baca Kabupaten Bandung memiliki peran multidimensi dalam memperkuat literasi sekaligus mendorong kesadaran kesetaraan gender, baik melalui mekanisme struktural, inovasi program, kolaborasi lintas pihak, maupun pergeseran cara pandang terhadap makna literasi itu sendiri. Secara struktural, mekanisme pemilihan Duta Baca yang mensyaratkan adanya pasangan laki-laki dan perempuan membuka ruang partisipasi yang setara bagi kedua gender untuk terlibat aktif dalam isu literasi di ruang publik Ikhsan menjelaskan:

“Program ini ikut berkontribusi dalam peningkatan kesadaran kesetaraan gender karena beberapa indikator yakni sebagai berikut. Mekanisme pemilihan dutanya berpasangan yakni perempuan dan laki-laki.”

Selain jalur struktural tersebut, kontribusi ini juga berjalan melalui jalur kultural, yaitu peran Duta Baca sebagai *role model* yang mendorong keterlibatan generasi muda dari kedua gender untuk berinteraksi dan berkontribusi di ruang publik, sekaligus memanfaatkan momentum produktivitas usia remaja menuju dewasa muda (17–22 tahun) dalam mendukung program dinas seperti Bunda Literasi. Rike Damayanti, Pegiat Literasi Duta Baca, menegaskan bahwa peran ini terwujud melalui tiga bentuk: menjadi teladan bahwa kegiatan literasi tidak membedakan gender (misalnya keterlibatan perempuan dalam karang taruna di tingkat RT/RW), menjadi agen perubahan lewat kegiatan seperti kunjungan ke Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan kegiatan bedah buku, serta:

“Bekerja sama dengan pemerintah, sekolah, komunitas, dan masyarakat. Kolaborasi pentahelix ini dapat membangun budaya literasi secara merata oleh warga masyarakat di Kabupaten Bandung.”

Pola kolaborasi pentahelix ini juga tampak pada tahap penugasan lapangan narasumber laki-laki, yang mengharuskan Duta Baca bekerja sama dengan pemangku kepentingan literasi seperti Bunda Literasi tingkat RW (perpusnas.go.id, 2025). Kolaborasi ini menempatkan Duta Baca sebagai simpul yang menghubungkan pemerintah/dinas, institusi pendidikan, komunitas literasi, hingga masyarakat akar rumput. Mengingat Bunda Literasi dan kader PKK secara historis didominasi perempuan, kolaborasi ini sekaligus menjadi jalur strategis untuk memperluas ruang partisipasi publik bagi perempuan di luar peran domestik.

Kontribusi tersebut turut ditopang oleh berbagai inovasi program literasi, baik yang bersifat personal maupun kedinasan. Narasumber Ikhsan mengembangkan podcast “Buka Buku” di Spotify, komunitas “Buka Buku Bareng”, dan konten pribadi “Gerakan Kesadaran”, sementara pihak kecamatan/Dispusip menjalankan Motor Baca, Perpustakaan Keliling (Pusling), perpustakaan digital E-Bandung Kab. Kombinasi pendekatan konvensional, digital, serta berbagai program unggulan Dispusip dan berbasis komunitas ini penting untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan preferensi dan kondisi akses yang beragam, termasuk dalam konteks kesetaraan gender, karena program-program tersebut pada dasarnya

terbuka bagi laki-laki maupun perempuan tanpa pembatasan (Supriatna, Permanawaty, Purwayandi, Noberti, & Kurnia, 2025).

Landasan dari seluruh peran dan inovasi tersebut adalah adanya pergeseran pemaknaan literasi di kalangan pelaku program. Rike Damayanti menyatakan bahwa literasi bukan hanya diartikan sebagai membaca dan menulis. Literasi itu luas maknanya. Singkatnya, literasi itu kemampuan memahami, menafsirkan, dan menggunakan informasi secara efektif. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Ikhsan yang memaknai literasi sebagai “ruh pendidikan” yang mencerminkan kualitas pembangunan masyarakat dan pejabat suatu daerah. Rike menyoroti literasi dari sisi kompetensi kognitif individu, sedangkan Ikhsan menyoroti dampak kolektifnya terhadap pembangunan daerah. Keduanya saling melengkapi dan menegaskan pergeseran paradigma literasi dari sekadar keterampilan teknis sederhana seperti baca-tulis saja, menjadi kompetensi fungsional yang mendukung partisipasi warga negara di ruang publik, termasuk dalam isu kesetaraan gender.

Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam tersebut, penulis menilai bahwa peran Duta Baca terhadap literasi dan kesetaraan gender bersifat multijalur yakni struktural (mekanisme berpasangan), kultural (role model dan agen perubahan), operasional (pengenalan beragam inovasi program), relasional (kolaborasi pentahelix), dan konseptual (pergeseran makna literasi). Keseluruhan jalur ini berjalan berdasarkan praktik dan inisiatif tidak tertulis, bukan kebijakan formal yang eksplisit mengharuskan partisipasi masing-masing gender harus berpartisipasi berapa puluh persen.

Urgensi Keberlanjutan Program dan Tantangan Kesetaraan Gender ke Depan

Program Duta Baca dinilai penting untuk terus dilanjutkan karena berperan sebagai perpanjangan tangan Dispusip Kabupaten Bandung dalam menyosialisasikan pentingnya literasi kepada masyarakat. Ikhsan Ripandi menegaskan bahwa esensi utamanya dimaknai dari literasi yang merupakan ruh pendidikan, dikotomi baik atau buruknya pembangunan masyarakat daerah salah satunya bisa dinilai dari bagaimana literasi masyarakat dan pejabat. Penyampaian pesan literasi dinilai tidak cukup jika hanya dilakukan oleh satu pihak atau institusi. Kehadiran generasi muda yang fleksibel dan mampu turun langsung ke lapangan menjadi kunci memperluas jangkauan mobilitas program literasi, sejalan dengan tiga fungsi utama Duta Baca yakni sebagai penyampai informasi kedinasan, pemberi pengaruh agar masyarakat gemar membaca, dan *role model* bagi generasi muda berpotensi.

Urgensi ini juga didasari harapan pemerataan keberadaan Duta Baca di seluruh 31 kecamatan Kabupaten Bandung, agar setiap wilayah memiliki representasi yang dapat menyerap aspirasi masyarakat, sebagaimana halnya program Pusling yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan saran kepada dinas. Namun demikian, keberlanjutan program ini menghadapi tantangan yang perlu menjadi perhatian, khususnya terkait konsistensi capaian kesetaraan gender pada tahap rekrutmen. Ikhsan menjelaskan:

“Terdapat 2 angkatan yang setara kuantitas calon duta baca Kabupaten Bandung laki-laki dan perempuannya yakni angkatan 2024 dan 2025. Sedangkan melansir dari informasi yang dibagikan di Instagram Dispusip Kab. Bandung maupun Paguyuban Duta Baca Kab. Bandung, pada tahun 2026 terdapat kesenjangan finalis yang lolos itu didominasi oleh kaum perempuan.”

Data ini menunjukkan bahwa keseimbangan gender pada tahap pendaftaran (angkatan 2024–2025) tidak serta-merta berbanding lurus dengan keseimbangan pada tahap akhir seleksi finalis 2026 yang dilansir dari Instagram Dispusip Kab. Bandung terdiri atas 12 Finalis perempuan, dan 8 finalis laki-laki (dutabacakab.bandung, 2026). Ketimpangan ini dapat mengindikasikan adanya perbedaan tingkat kesiapan atau kepercayaan diri calon peserta laki-

laki dan perempuan dalam tahapan wawancara, tes tulis, dan unjuk bakat, maupun perbedaan pola sosialisasi atau minat pendaftaran yang belum terekam secara rinci dalam penelitian ini. Narasumber menegaskan bahwa kondisi ini tetap diperkenankan karena pemerintah tidak membatasi kuota pendaftaran berdasarkan gender, dengan catatan hasil akhir tetap harus menghasilkan satu pasang pemenang laki-laki dan perempuan yang artinya, kesetaraan gender dalam program ini lebih ditegakkan pada tahap keluaran atau *output* berupa komposisi pemenang, ketimbang pada keseluruhan proses seleksi.

Temuan ini menjadi catatan kritis bahwa kesetaraan gender yang tampak pada hasil akhir program berpotensi menutupi bias atau kesenjangan partisipasi pada tahap-tahap seleksi sebelumnya. Hal ini diperkuat oleh belum adanya regulasi tertulis yang secara eksplisit mengatur kesetaraan gender dalam program literasi, sehingga seluruh capaian yang ada saat ini masih bergantung pada mekanisme dan komitmen tidak tertulis dari pelaku program maupun Dispusip.

Dengan demikian, urgensi keberlanjutan program Duta Baca tidak hanya terletak pada fungsi teknisnya sebagai penyalur informasi kedinasan dan instrumen pembangunan sumber daya manusia daerah, tetapi juga pada kebutuhan mendesak akan payung kebijakan tertulis yang mengatur kesetaraan gender secara menyeluruh. Baik pada tahap proses maupun hasil seleksi, supaya keberlanjutan dan konsistensi capaian kesetaraan gender dalam program literasi tidak semata bergantung pada komitmen individu, melainkan didukung oleh regulasi formal yang mengikat dan berkesinambungan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa program Duta Baca Kabupaten Bandung memiliki peran strategis dalam memperkuat kesadaran kesetaraan gender yang tercantum dalam regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Proses menjadi Duta Baca yang melalui lima tahapan seleksi ketat menempatkan program ini bukan sekadar ajang aktualisasi diri generasi muda, tetapi juga instrumen non-formal yang mengisi celah struktural kebijakan gender di daerah. Kontribusi Duta Baca terhadap isu ini terbukti bersifat multijalur, mencakup dimensi struktural yang mekanisme pemilihannya berpasangan yang diwakili satu dari kaum laki-laki dan perempuan, kultural yang berperan sebagai *role model* dan agen perubahan lintas gender, berkontribusi aktif dalam operasional atau beragam inovasi program literasi konvensional dan digital, membangun relasi aktif dari kolaborasi pentahelix bersama Bunda Literasi, sekolah, dan komunitas, serta konseptual yang menggeser pemaknaan literasi dari keterampilan teknis menjadi kompetensi fungsional yang mendukung partisipasi publik.

Meski capaian tersebut positif, penelitian ini juga mengungkap catatan kritis bahwa kesetaraan gender dalam program Duta Baca lebih terjaga pada tahap keluaran, yakni komposisi akhir pemenang yang selalu berpasangan, dibandingkan pada keseluruhan proses seleksi. Temuan mengenai dominasi peserta perempuan pada tahap finalis 2026, meskipun jumlah pendaftar relatif seimbang pada angkatan 2024–2025, mengindikasikan adanya potensi kesenjangan kesiapan atau pola partisipasi yang belum sepenuhnya terpetakan. Kondisi ini diperparah oleh belum adanya regulasi tertulis yang secara eksplisit mengatur kesetaraan gender dalam program literasi, sehingga seluruh capaian yang ada saat ini masih bertumpu pada komitmen individu dan kebijakan tidak tertulis dari pelaksana program maupun Dispusip, bukan pada kepastian kebijakan formal.

Berdasarkan temuan tersebut, keberlanjutan program Duta Baca perlu didukung oleh penyusunan payung kebijakan tertulis yang mengatur kesetaraan gender secara menyeluruh, baik pada tahap proses rekrutmen maupun hasil seleksi, agar tidak semata bergantung pada inisiatif individu yang rentan berubah antar periode. Pemerataan keberadaan Duta Baca di

seluruh 31 kecamatan Kabupaten Bandung juga perlu menjadi perhatian agar representasi dan penyerapan aspirasi masyarakat berjalan optimal. Secara akademis, penelitian ini memperluas kajian aktor non-negara dalam ilmu Hubungan Internasional dengan menghadirkan perspektif aktor individu di tingkat lokal sebagai perantara norma global pengarusutamaan gender ke dalam praktik komunitas, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung serta Perpustakaan Nasional dalam merancang program Duta Baca yang lebih responsif gender ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, F. H. (2025). ISU-ISU GENDER DALAM PERSPEKTIF SOSIAL, POLITIK DAN PENDIDIKAN SERTA UPAYA MEWUJUDKAN KESETARAAN YANG BERKELANJUTAN . 1-6.
- Biddle, B. J. (1986). RECENT DEVELOPMENTS IN ROLE THEORY. 67-68.
- BPK, J. (2000, Desember 19). Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/285278/inpres-no-9-tahun-2000>
- bpk.go.id. (2016, Mei 27). Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/263945/perbup-kab-bandung-no-24-tahun-2016>
- BPS. (2026, Mei 5). Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE5NiMy/indeks-ketimpangan-gender--ikg-.html>
- dinarpustaka.lamongankab.go.id. (2025, April 14). Retrieved from <https://dinarpustaka.lamongankab.go.id/posting/24412#:~:text=Duta%20Baca%20Daerah%20merupakan%20figur%20publik%20yang%20ditunjuk,miliki%20kompetensi%20untuk%20meningkatkan%20budaya%20gemar%20membaca%20masyarakat.>
- Direktorat. (2025, Agustus 27). Retrieved from <https://vokasi.kemendikdasmen.go.id/read/b/peran-strategis-pemerintah-daerah-dalam-penguatan-program-keaksaraan-dan-literasi-masyarakat#:~:text=Dengan%20melibatkan%20lembaga%20pendidikan%20organisasi%20masyarakat%20dunia%20usaha,gerakan%20literasi%2>
- dutabacakab.bandung. (2026, Agustus 25). Retrieved from https://www.instagram.com/dutabacakab.bandung/p/DceDM09j6GkUd2gS2fyEafdEs_wm3shhhv9T87k0/
- Ekos. (2025, Maret 10). Retrieved from <https://www.indokliknews.com/hadirnya-motor-baca-membangkitkan-semangat-siswa-sekolah-membaca-buku-3037>
- firdaus, A. T. (2022). PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI INDONESIA. 5-6.
- jabarprov.go.id. (2021, Februari 10). Retrieved from <https://jdih.jabarprov.go.id/page/info/produk/25580>
- Kertati, I. (2022). IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN TUJUH PRASYARAT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DI DAERAH . *Jurnal Media Administrasi* , 3-4.
- Khanza, A. M. (2021, Agustus 26). Retrieved from <https://www.jurnalhi.com/2021/08/aktor-dalam-hubungan-internasional.html>
- Khodijah, E. S. (2026). Retrieved from September 04, 2026, dari https://drive.google.com/drive/folders/1rcypVkigo6dAo9Wgi_sB7duFVRNUrBw5?usp=drive_link
- Nabila, R., Yamardi, & Sukmapryandhika, D. (2025). PENGARUH PELAKSANAAN PROGRAM LITERASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN BUDAYA LITERASI DI KECAMATAN

- RANCABALI KABUPATEN BANDUNG. *Jurnal Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 1-10.
- Nadiya, I., Nursanti, S., & Lubis, F. M. (2023). Kredibilitas Komunikator Pesan dan Saluran Komunikasi Persuasif Duta Baca dalam Upaya Meningkatkan Minat Baca Remaja dan Anak di Kabupaten Karawang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 1-2.
- Nasution, M. F. (2019). The Night Wolves: Klub Motor Patriotis Milik Rusia. *Jurnal Sentris KSMPMI*, 13-14.
- Nuridin. (2024). Analisis Pengarusutamaan Gender di Indonesia, 2000-2023: Pendekatan Institusionalisasi. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 949-950.
- Nurfadillah, S., Winoto, Y., & Winoto, Y. (2026). Peran duta baca dalam meningkatkan literasi minat baca pada generasi Z di Jawa Barat. *Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 57-66.
- Pamungkas, S. W., Annur, F., & Munadi, M. (2026). KONTRIBUSI KOMUNITAS LITERASI DALAM PENGUATAN RUANG PUBLIK INKLUSIF DI KOTA SURAKARTA: SEBUAH ANALISIS KRITIS . *Pustabiblia: Journal of Library and Information Science*, Vol. 10 No.1, 1-2.
- perpusnas.go.id. (2025, Februari 05). Retrieved from <https://perpusnas.go.id/berita/strategi-pentahelix-sinergi-literasi-untuk-martabat-bangsa>
- pinterhukum.or.id. (2023, Maret 5). Retrieved from <https://pinterhukum.or.id/transnasionalisme-peran-aktor-non-negara-dalam-hubungan-internasional/#:~:text=Konsep%20aktor%20non-negara%20membahas%20tentang%20bagaimana%20relasi%20aktor,oleh%20perjuangan%20untuk%20pemenuhan%20prinsip-prinsip%20hak%20asasi%20>
- Ramadhan, G. (2026). Peran Duta Baca Dalam Mendukung Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru: Analisis Metode Cippo. *Skripsi*, 1-73.
- Sandra. (2025, Maret 2). Retrieved from <https://inca.ac.id/literasi-kritis/#:~:text=Literasi%20kritis%20adalah%20kemampuan%20untuk%20menganalisis%2C%20menafsirkan%2C%20dan,mengevaluasi%20informasi%20dengan%20cara%20yang%20reflektif%20dan%20logis.>
- Sartika, B. (2022, Januari 18). Retrieved from <https://www.perpusnas.go.id/berita/duta-baca-indonesia-berperan-penting-untuk-membumikan-literasi>
- Soetjipto, A. W., & Yuliestiana, A. T. (2020). TRANSNATIONAL RELATIONS AND ACTIVISM IN INTERNATIONAL RELATIONS: DEBATES AND CONSENSUS IN LITERATURE . *Global: Jurnal Politik Internasional* Vol. 22 No. 1., 142-143.
- statistik.jabarprov.go.id. (2026). Retrieved from <https://statistik.jabarprov.go.id/dashboard/ipg>
- Sudirman, F. A., & Susilawaty, F. T. (2022). KESETARAAN GENDER DALAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs) : SUATU REVIUW LITERATUR SISTEMATIS. *Journal Publicuho*, 1005-10006.
- Sundari, Y. (2026, Maret 08). Retrieved from <https://perpustakaan.ummi.ac.id/id/2026/03/perempuan-buku-dan-perubahan-kisah-inspiratif-dari-dunia-literasi/#:~:text=Melalui%20literasi%2C%20perempuan%20tidak%20hanya%20menjadi%20penerima%20informasi%2C,yang%20sama%20dalam%20mengakses%20pendidikan%20dan%2>
- Supriatna, D., Permanawaty, E. D., Purwayandi, T., Noberti, A. Y., & Kurnia, S. (2025). Buku Saku Bunda Literasi Tingkat Rukun Warga. Dalam T. KABELAT. Bandung: Dispusip Kabupaten Bandung.

- Triansyah, B. (2023, Juli 26). Retrieved from https://www.kompasiana.com/bayutr12/64c0ed2f08a8b5255a791973/peran-aktor-non-negara-dalam-hubungan-internasional-organisasi-internasional-sebagai-jembatan-global#goog_rewarded
- unair.ac.id. (2025, Januari 6). Retrieved from <http://unair.ac.id/kenali-17-tujuan-sdgs-dan-penjelasan/>
- uny.ac.id. (2022, Juni 03). Retrieved from <https://www.uny.ac.id/id/berita/pentingnya-pug-dalam-pembangunan-daerah#:~:text=Pengarusutamaan%20Gender%20%28PUG%29%20adalah%20strategi%20yang%20dilakukan%20secara,di%20berbagai%20bidang%20kehidupan%20pembangunan%20nasional%20dan%20daerah.>